

IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERBICARA PERS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Kinteki Murni

Ilmu Hukum FH-UNKAR Surabaya

Abstrak

Negara Republik Indonesia yang sedang berkembang dimulai sejak pemerintahan Orde Baru telah membawa perubahan kepada kemajuan bangsa sejalan dengan kemajuan tersebut, kesadaran akan hak-hak kewajiban rakyat juga mengalami perubahan. Rakyat menjadi sadar akan hak-haknya, bukan hanya kewajibannya saja yang selalu dibebankan kepada dirinya. Hal yang demikian sudah tentu membawa konsekuensi bagi suatu negara hukum untuk melindungi hak-hak dan kewajiban rakyatnya dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang diciptakan oleh suatu negara hukum. Dalam konsep nasional mengenai suatu pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan suatu teori pers baru mengenai tanggung jawab sosial (*social responsibility*), maka khususnya pengertian mengenai pers yang bertanggung jawab lebih ditujukan kepada etik jurnalistik.

Sebagai negara hukum, setiap perbuatan dan tindakan harus dan selalu menurut dan didasarkan atas hukum. Dengan demikian perbuatan dan tindakan akan dapat dibatasi dalam arti terkontrol dan di lain pihak hak-hak asasi setiap warga negara akan terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa. Hukum yang dimaksud bukanlah sekedar hukum dalam arti formal atau hukum yang sudah memenuhi prosedur daripada pembentukan undang-undang (legislatif), melainkan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi di sinilah justru sangat diperlukan sikap kehati-hatian dan kejelian dalam menangkap serta memberi arti akan makna negara hukum.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apabila kebebasan yang bertanggung jawab sebagai suatu hak asasi menurut konstitusi dalam hukum pers, maka pelaku delik pers dapat dituntut di muka sidang pengadilan.

PENDAHULUAN

Peneliti menyadari bahwa kebebasan pers di manapun di dunia ini, tidak mungkin mutlak sifatnya. Kebebasan seseorang terhenti manakala kebebasan orang lain dilanggar dan kebebasan individu harus mengalah untuk kepentingan umum. Dengan dalih kebebasan pers dengan sendirinya tidak mungkin ditolerir tulisan-tulisan pers yang bersifat menghasut, memfitnah ataupun mencemarkan nama baik seseorang dengan seenaknya. Secara konkrit kebebasan mengeluarkan pendapat ini telah diatur dalam hukum positif, yaitu dalam konstitusional, Tap MPRS No. XXXII/MPRS/1966, serta peraturan-peraturan perundangan yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, serta di kalangan wartawan telah diatur kode etik jurnalistik.

Dapatlah diketahui bahwa kode etik jurnalistik (Indonesia) memuat beberapa pasal (6 pasal), mengenai:

1. Kepribadian wartawan Indonesia
2. Pertanggungjawaban
3. Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat
4. Hak Jawab
5. Sumber Berita
6. Kekuatan kode etik (Oemar Seno Aji, 1990).

Esensi dari pers bebas adalah tidak diperkenankannya langkah ataupun tindak preventif dalam kehidupan hukum kita, larangan sensor dan pembredelan pers,

dihapuskannya SIT, yang eksistensinya adalah sementara sifatnya. Di samping larangan preventif, diperkenankan adanya langkah represif justisial sebagai pembatasan yang sah terhadap kebebasan pers yang berupa peraturan pidana, pencipta delik-delik pers yang dapat menghadapkan pers pada hakim pidana, apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana. Kebebasan pers selalu dikatakan konvensi pembatasan untuk informasi, bahwa ia membawa kewajiban dan tanggung jawab, hal ini diakui dalam Ketetapan MPRS No.XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, dalam konsideransnya diakui bahwa mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui pers adalah hak asasi tiap-tiap warga negara.

Kesadaran dalam mengartikan kebebasan pers yang bertanggung jawab tidak bisa digunakan secara sepihak, yaitu pihak pers saja dalam mengeluarkan pendapat dan pernyataan, tetapi justru yang penting ialah masyarakat mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi-informasi yang benar, sehingga masyarakat atau publik dapat menilai secara sehat pernyataan yang disalurkan lewat pers. Jadi kebebasan pers itu memang ada, akan tetapi kebebasan di sini bertanggung jawab, jadi terbatas sifatnya. Bahkan orang-orang dari kalangan pers sendiri mengakui bahwa kebebasan itu ada meskipun terbatas, cuma menurut mereka bagaimana cara memanfaatkan kebebasan itu, ini semua tergantung orang-orang pers itu sendiri untuk memanfaatkannya,

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah Apakah pelanggaran kebebasan sebagai suatu hak asasi menurut konstitusional dalam hukum pers dapat dituntut di muka sidang Pengadilan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah pers. Sedangkan secara sosiologis yaitu didasarkan pada kenyataan

yang ada dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari kasus-kasus yang terdapat di dalam majalah ataupun koran/surat kabar, kasus-kasus yang diperoleh di pengadilan yang telah diproses. Data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan dihimpun secara kuantitatif dan diatur sesuai dengan permasalahannya. Kemudian dari data itu, dikelompokkan secara kuantitatif itu, dapat dengan mudah untuk digunakan sebagai dasar mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Delik Pers

Menurut karangan hukum pidana dari tulisan Vos dan Jonkers, dapat diperoleh ksesan bahwa delik pers adalah delik yang dilakukan dengan mempergunakan alat cetak dan pelaksanaannya telah terjadi melalui publikasi (Bambang Purnomo, 1982). Tidak semua yang dipakai melalui alat cetak dan di publikasikan sebagai delik pers, delik pers pada umumnya ialah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan pers atau alat cetak dan dipublikasikan sebagai sarana pembantu untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum oleh orang pers sendiri atau orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembuat delik.

Dalam delik pers terdiri atas tiga kemungkinan pembuat delik :

- 1).Peneliti atau periggambar
- 2).Penerbit dan atau pencetak
- 3).Redaktur

Kedudukan ketiga golongan ini dalam kualitasnya tidak dapat menjadi pembuat delik bersamaan.(Djoko Prakoso, 2001)

Namun di luar ketentuan di atas, maka orang yang bukan termasuk salah satu dari tiga kemungkinan di atas dapat juga dilakukan oleh orang luar yang disebut peneliti. Peneliti adalah orang yang mengeluarkan atau memberikan buah pikirannya dan tulisannya untuk dipublikasikan atau dimuat di dalam media massa/cetak pers, dan biasanya di sini peneliti tidak mau namanya dicantumkan serta sebagai peneliti berita.

Kebebasan Berbicara Untuk Mengeluarkan Pendapat Dan Pikiran Dalam Pers

Sumber hukum ketentuan undang-undang ini adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Tolok ukur bagi undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang kemerdekaan ataupun kebebasan mengeluarkan pikiran dan tulisan atau dengan kata lain kebebasan sebagai pelaksanaan dari pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi :

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tulisan berarti kemerdekaan mengeluarkan pikiran melalui media pers, media cetak yaitu surat-surat kabar harian, majalah-majalah, bulletin-bulletin, dan majalah berkala lainnya yang bersifat umum (Bachsan Mustafa, 1987). Yang dimaksudkan kebebasan pers atau kemerdekaan pers didalam UUD 1945 memakai istilah yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

Sedangkan di dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang mengenai penerangan dan media pers butir d yang berbunyi : "Pers yang bebas dan bertanggung jawab yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif". Apabila kita berbicara mengenai kebebasan pers, maka terlebih dahulu melihat dari bentuk suatu negara politik, antara lain bentuk kebebasan di negara liberalisme; hak kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun secara tulisan adalah sangat bebas, seolah-olah tanpa batas. Kebebasan pers di negara komunisme, maka rakyatnya tidak mempunyai kebebasan sama sekali untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, apabila tidak tegas-tegas mendukung kebijaksanaan politik yang digariskan oleh partai, yang merupakan partai negara dari negara tersebut. Sedangkan negara menganut demokrasi Pancasila

(Indonesia), kebebasan pers itu ada, namun kebebasan itu bertanggung jawab, jadi walaupun kebebasan yang diberikan oleh pemerintah itu ada namun tidak terlepas hubungannya dengan terkaitnya instansi pemerintah dan masyarakat.

Memang sampai sejauh ini mengenai masalah kebebasan pers tidak terlepas dari masalah kebebasan hak asasi dari manusia untuk memberikan atau mengeluarkan pendapatnya. Apabila hak asasi dari manusia atau kebebasan dari pers tidak mendapatkan hak yang istimewa dalam pemberitaan, maka di dalam pemberitaan media pers akan kelihatan monoton. Kebebasan pers yang bertanggung jawab sangat dibutuhkan sekali.

Jadi kebebasan pers di Indonesia itu memang ada, akan tetapi kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, jadi terbatas sifatnya sebab bagaimanapun juga di dunia ini tidak ada kebebasan yang mutlak sifatnya. Bahkan orang-orang dari kalangan pers itu sendiri mengakui bahwa kebebasan itu ada meski terbatas, cuma menurut mereka bagaimana kita dapat mempergunakan kebebasan itu atau bagaimana cara memanfaatkan kebebasan yang ada. Semua itu tergantung pada orang-orang pers sendiri untuk memanfaatkan.

Tanggung Jawab Fiktif dan Tanggung Jawab Successif Dalam Delik Pers

Tanggung jawab fiktif adalah tanggung jawab redaktur yang memegang pimpinan atas penyelenggaraan redaksional dari pemberitaan yang melawan hukum (Bambang Purnomo, 1984). Di sini redaktur yang bertanggung jawab langsung atau mengambil alih tanggung jawab, yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya atau disebut anggota redaksi dan bertanggung jawab atas tulisan dan gambar yang dibuat oleh orang lain atau disebut peneliti, yang mana tulisan atau gambar itu telah dicetak dan dimuat di dalam media pers.

Sedangkan tanggung jawab successif adalah pehimpahan tanggung jawab dari pimpinan umum kepada pimpinan redaksi, di sini pemimpin umum melepaskan tanggung jawabnya selaku penyelenggara redaksional

karena adanya undang-undang no. 11 tahun 1966 pasal 15 ayat (2) dan (4). Namun ada kemungkinan bagi pemimpin umum untuk melaksanakan tanggung jawab itu sendiri dan tidak melimpahkan kepada jajaran di bawahnya, ini seperti yang terjadi pada majalah Sastra No. VIII/1968, oleh H.B. Jassin mengenai Langit Makin Mendung.

Dari kedua uraian di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa antara tanggung jawab fiktif dan tanggung jawab successif tersebut kita temukan persamaannya, yaitu antara tanggung jawab fiktif dan tanggung jawab successif adalah merupakan tanggung jawab yang sifatnya sementara atau pengganti saja. Karena pertanggung jawaban fiktif adalah sifatnya karena pemimpin umum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan redaksional. Sedangkan pertanggung jawaban successif adalah sifatnya anonim atau pengganti karena mengambil alih atas tulisan atau gambar yang dibuat oleh orang lain yang namanya tidak mau disebutkan atau dicantumkan di dalam rubrik berita. Jadi persamaan antara tanggung jawab fiktif dan tanggung jawab successif adalah bahwa antara keduanya dituntut pertanggung jawaban pidana dimuka pengadilan bukan sebagai pembuat delik pers yang sesungguhnya.

Pertanggung jawaban fiktif dan pertanggung jawaban successif adalah jelas sekali tampak suatu perbedaan dalam masalah pertanggung jawabannya. Di dalam tanggung jawab fiktif pemimpin umum dapat melepaskan tanggung jawabnya kepada pemimpin redaksi, apabila pemimpin umum tidak mau untuk menerimanya atau tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tanggung jawabnya di muka pengadilan. Sedangkan tanggung jawab successif ini pemimpin redaksi tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu dengan mudah seperti yang dilakukan pemimpin umum, karena ketentuan pelimpahan tanggung jawab successif itu tidak ada pengaturannya.

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak Pers

Berdasarkan Undang-undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 tentang: Tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers adalah

sebagai berikut :

- Mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.
- Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila.
- Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.
- Membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, dan fasisme atau diktator.
- Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner.

Di sini jelas bahwa pers sebagai lembaga masyarakat yang berfungsi untuk mendukung kemajuan masyarakat lingkungannya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan pesan-pesan kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi pers adalah sebagai alat revolusi dan merupakan mass media yang bersifat aktif dinamis, kreatif, informatif dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan memupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia. Di dalam penyebar luaskan informasi yang obyektif melalui kontrol sosial, penyalur aspirasi rakyat yang konstruktif dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. (Oemar Seno Aji, 1990) Dalam rangka merealisasi hal di atas, dan memantapkan fungsi pers untuk menyebarluaskan informasi, maka keterbukaan untuk memberikan informasi pers perlu dikembangkan,

hal ini mengingat bahwa keterbukaan untuk memberikan itu masih tergantung kepada sikap pribadi pejabat yang memimpin instansi.

Meskipun demikian agar fungsi kontrol sosial itu dapat dilakukan secara lebih lancar, dan semakin mantap maka orang-orang pers menyadari bahwa wartawan pers sangat memerlukan pengakuan dan jaminan yang lebih tegas terhadap hak tolak wartawan. Hak tolak wartawan adalah hak untuk tidak mau

mem berikan kesaksiannya di muka pengadilan, kecuali di dalam hal yang menyangkut masalah negara, demi menjaga agar orang yang memberikan informasi itu selamat dan dalam keadaan baik.

Interaksi Positif Antara Pemerintah, Pers Dan Masyarakat Dalam Kebebasan Pers

Bahwa untuk melaksanakan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, khususnya bidang penerangan dan pers dipandang perlu mengadakan perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967.

Mengingat dalam UUD 1945 pasal 28 dan pasal 33 dan Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 lampiran A tentang penerangan massa, juga Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966, tentang pembinaan pers, dan mencabut Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan pers dan segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan undang-undang ini. Dalam perspektif politik dapat kita ketengahkan tiga jenis pola interaksi politik yang kita jumpai pada tiga bentuk sistem politik pemerintahan yaitu sebagai berikut;

Pola pertama, sebagaimana kita lihat pada negara yang menganut paham liberalisme, didalam paham ini hubungan interaksi akan tampak berat sebelah. Di satu pihak pers dan masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyampaikan kepentingan dan aspirasinya kepada pemerintah, di lain pihak yaitu pihak pemerintah tidak begitu dominan dalam menerapkan hubungan interaksi tersebut, karena pemerintah sesuai dengan paham liberalisme yang dianutnya harus menjunjung tinggi dan memihak kepada kepentingan serta aspirasi masyarakat (Toto Pandoyo, 1981)

Pola kedua, seperti apa yang terjadi pada negara otoriter atau negara-negara komunis, dalam hubungan interaksi gerbada dengan halnya pada pola pertama, bobot hubungan interaksi cenderung lebih banyak pada kebijaksanaan pemerintah. Hal ini

berarti bahwa pers maupun masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan, karena segala sesuatunya diatur dan harus memenuhi selera dan keinginan dari pemerintah atau penguasa.

Pola ketiga, berbeda dengan pola pertama dan kedua, dalam negara yang berideologi Pancasila, hubungan interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat diletakkan pada skala berimbang dan profesional.

Di dalam negara Republik Indonesia, pers mendapat tempat yang sangat baik sebagai media informasi dan sumber berita, yang dimaksud di sini adalah kebebasan pers, dan interaksi hubungan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan pers benar-benar berimbang dan tidak ada yang diapriorikan dengan peranan pers yang bebas bertanggung jawab.

Sedangkan dasar hukum interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat tercantum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1966 pasal 2 ayat (3) yang berbunyi :

Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif, dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.

Terhadap ketentuan pasal di atas, pemerintah melalui Dep Penerangan mengatakan bahwa

Pers Indonesia adalah spesifik milik bangsa Indonesia yang berjuang, kepentingan pers (ongdergeshikt) kepada kepentingan nasional dan pers tidak berhadapan dengan pemerintah, melainkan bekerja sama dalam ikatan interaksi positif dengan pemerintah dan masyarakat. Inti dari Undang-undang Pokok pers bukan saja mencerminkan, tetapi juga benar-benar merupakan tatanan atau penjabaran normatif, terurai dan jelas dari interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat, merupakan sasaran yang dituju tidak lain dari usaha membangkitkan potensi pers untuk benar-benar dapat menjadi

kekuatan pembangunan yang tangguh.

Selanjutnya orang-orang pers mengatakan bahwa pembangunan bidang-bidang lainnya, karena secara politis, ideologi, maka pers merupakan sarana untuk meratakan jalan, merintis kemerdekaan kebersamaan dalam setiap kurun waktu pembangunan.

Dewan pers dan Surat Perizinan Usaha Penerbitan

Dewan pers berfungsi untuk mendampingi pemerintah dalam bersamasama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Pengertian mendampingi di sini yaitu bahwa dewan pers ini berfungsi sebagai badan penasehat dari pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional.

Mengenai keanggotaan daripada dewan pers itu sendiri diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1966 pasal 6 ayat (2) berbunyi:

Anggota dewan pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang ini. Di dalam penunjukkan ahli-ahli di bidang pers ini dilakukan pemerintah setelah mendeagarkan organisasi pers, ketua dewan pers.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) dikatakan : Bahwa pemerintah setelah mendengarkan pertimbangan dewan pers membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Dewan pers ini diketuai oleh Menteri Penerangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Ketua dewan pers adalah menteri penerangan, maka dalam dewan pers terdapat dualisme pembinaan pers untuk mencegah terjadinya dualisme pembinaan pers ini sebagai gantinya adalah kata mufakat yang dicapai sebagai hasil musyawarah di dalam dewan pers.

Peraturan Pemerintah RI. No. 1 Th 1984 tentang Dewan Pers mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang seperti yang disebutkan dalam pasal sebagai berikut:

Kedudukan dewan pers seperti disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1984 pasal 1 bunyinya : Suatu wadah

musyawarah non struktural yang mendampingi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional agar mampu menunjang pembangunan masyarakat Pandasila.

Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1984 disebutkan bahwa dewan ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mendampingi Menteri Penerangan dalam menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pers,
- Mengembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pers yang sehat dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila
- Mendampingi Menteri Penerangan dalam melakukan bimbingan idil kewartawanan dan pengusaha pers, termasuk pengembangan kelembagaan idil di bidang jurnalistik, pengelolaan usaha pers, grafika pers dan periklanan terutama periklanan pers,
- Mendampingi Menteri Penerangan dalam melakukan penilaian terhadap pemanfaatan pemberian fasilitas oleh pemerintah terhadap pers,
- Mengawasi pelaksanaan pentaatan kode etik yang berlaku di bidang kewartawanan, pengusahapers, grafikapers dan periklanan,
- Melakukan usaha-usaha lain yang menajukan pertumbuhan dan perkembangan pers nasional.

Dari keterangan di atas, maka fungsi dewan pers ini sangat penting sekali dalam bidang pers nasional dan media massa pers, karena di samping menjadi ketua dewan pers itu sendiri, dewan pers ini juga menjadi pendamping sekaligus menjadi penasehat menteri penerangan dalam pengawasan dan pelaksanaannya.

Dalam masalah dewan pers ini, orang-orang pers umumnya sependapat dengan pemerintah bahwa mengikut sertakan semua unsur pers dalam mekanisme dewan pers, termasuk soal kebebasan pers yang bertanggung jawab. Hal ini karena masalah tersebut menyangkut hal-hal yang prinsip dalam kehidupan pers. Selanjutnya dalam hubungan harmonis antara pemerintah dan pers, maka sebaiknya pemerintah dan DPR mempertimbangkan agar bukan hanya

pimpinan harian dewan pers yang dipilih dari oleh anggota dewan pers, melainkan ketua dewan pers juga.

Adapun mengenai kedudukan ketua dewan pers yang dijabat oleh menteri penerangan, pemerintah mengatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak terjadi dualisme dalam pembinaan, pengembangan maupun pembangunan pers nasional, terutama dalam rangka memantapkan kedudukan pers sebagai sub sistem di dalam integritasnya dalam sistem nasional. Dualisme yang dimaksud akan timbul, apa bila di satu pihak pembinaan pers dilakukan oleh menteri penerangan, sedangkan di lain pihak dewan pers yang juga menjalankan fungsi pembinaan pers, diketuai oleh bukan menteri penerangan.

Dasar hukum ketentuan SIUPP ini adalah pasal 13 ayat (3) undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 yang berbunyi; Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan surat izin usaha penerbitan pers, selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketentuan tentang SIUPP ini juga ada pengaturannya dalam peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 01/PER/MENPEN/ 1984, tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Di dalam pasal 3 peraturan ini yang berbunyi :

Penerbitan pers hanya dapat diselenggarakan oleh perusahaan/penerbitan pers sebagaimana dimaknakan dalam pasal 10 peraturan ini yang didirikan oleh :

- Seorang warga negara Indonesia bersama dengan sedikit-dikitnya dua orang lainnya,
- Pemerintah.

Penerbitan pers mengutamakan sifat idiil dan dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakekat demokrasi Pancasila.

Hak Tolak, Hak Jawab dalam Delik Pers

Ketentuan hak tolak atau hak ingkar ini terdapat dalam pasal 15 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 dan penjelasannya dikatakan bahwa hak tolak adalah hak wartawan untuk :

Meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan Sebagai saksi dalam

sidang pengadilan dan menolak memberikan yang diminta penyidik, yaitu keterangan tentang nama, jabatan, alamat atau identitas lain dari sumber informasinya, kecuali dalam hal yang menyangkut khususnya ketertiban dan keselamatan negara, hal mana yang ditentukan dengan keputusan tersendiri oleh hakim atas permintaan wartawan, keputusan mana harus secepatnya diberikan, dan selama keputusan belum diberikan sedangkan wartawan telah mengajukan permohonan yang dimaksud, maka wartawan yang bersangkutan tetap mempunyai hak tolak.

Sedangkan yang dapat atau mempunyai hak tolak itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (6) undang - undang Nomor 11 Tahun 1966 adalah sebagai berikut : Dalam mempertanggung jawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penelitinya mempunyai hak tolak.

Adapun maksud pemerintah terhadap ketentuan hak tolak ini adalah untuk lebih memperjelas pengakuan dan jaminan terhadap hak tolak wartawan dalam menjalankan fungsinya.

Hak jawab adalah hak yang diberikan kepada seseorang, organisasi, atau badan hukum yang merasakan dirugikan oleh suatu tulisan dalam pers. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pasal 15a yang terdiri dari 3 (tiga) ayat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Hak jawab merupakan hak seseorang, organisasi atau badan hukum yang berasa dirugikan oleh tulisan dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers, untuk meminta kepada penerbit pers yang bersangkutan agar penjelasan dan tanggapannya terhadap tulisan yang disiarkan atau diterbitkan, dimuat di penerbitan pers tersebut
2. Dalam batas-batas yang pantas penerbitan pers wajib memenuhi permintaan masyarakat pembacanya yang akan menggunakan hak jawab.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang hak jawab akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan dewan pers.

Apabila ada seseorang, organisasi atau badan hukum yang merasa teresang haknya dalam pemberitaan penerbitan pers, maka ia berhak untuk memberikan tanggapan atas tulisan yang menyerang terhadap dirinya itu dengan memuatkan berita atas tanggapan atau sanggahan terhadap berita itu, oleh pihak penerbit pers yang bersangkutan untuk memenuhi permintaan dari mereka yang dirugikan seperti yang tersebut dalam pasal di atas. Sedangkan ketentuan pidananya adalah untuk lebih memberikan jaminan bagi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dari pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966.

Lembaga Pers dan Pendapat Umum

Lembaga pers dan pendapat umum ini dahulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Departemen Penerangan, tetapi sejak tanggal 23 Juli 1953 berubah menjadi yayasan yang disahkan dengan akta notaris RM. Soewandi. Sehingga kemudian namanya berubah menjadi yayasan/lembaga pers dan pendapat umum dimana dengan keputusan Menteri Penerangan, yayasan ini mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Lembaga pers dan pendapat umum secara resmi dibuka pada tanggal 11 September 1952 di Jakarta, yang kantornya masih menumpang pada gedung perpustakaan Sejarah politik dan sosial di jalan Merdeka Selatan 11 Jakarta (Oerip Hartoyo, 1976). Maksud dan tujuan dari yayasan lembaga pers dan pendapat umum ini adalah untuk memberikan dorongan yang mendalam antara masyarakat dan pers dan membentuk suatu pueat penyelidikan ilmiah, yang merupakan tempat bertanya dalam lapangan komunikasi massa, juga memberi dan membuka kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai minat dalam lapangan komunikasi massa untuk belajar di lapangan pers.

Dalam usahanya mencapai tujuan itu, maka yayasan lembaga pers dan pendapat umum ini antara lain menyelenggarakan taman-taman bacaan, menyediakan dan memberikan bahan-bahan dokumenter (kliping surat kabar), menerbitkan tulisan-

tulisan yang berdasarkan ilmu; pengetahuannya yang ada sangkut pautnya dengan pers, mengusahakan segala sesuatu yang memberikan sumbangan untuk pembangunan dalam lapangan komunikasi massa. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari lembaga pers dan pendapat umum tersebut maka usaha-usaha yang telah dikerjakan adalah, mengadakan penelitian mengenai pengaruh-pengaruh surat-surat kabar Jakarta terhadap pers, pengaruh narkotika di kalangan muda-mudi dan lain.nya, (Zulkarnain Nasution, 1977)

Serikat Penerbit Surat Kabar

Organisasi serikat penerbitan surat kabar ini adalah sebagai suatu wadah organisasi profesi dari para penerbit pers nasional. Di samping itu serikat penerbit surat kabar ini juga merupakan suatu wadah bagi wartawan atau orang-orang pers untuk ikut serta merasa memiliki penerbitan pers. Dan juga serikat penerbit surat kabar ini merupakan suatu wadah untuk mengumpulkan segala permasalahan dan mutu peningkatan penerbitan pers nasional, baik dari segi idiil maupun dari segi managementnya.

1. Dasar Hukum Serikat Penerbit Surat Kabar

Serikat penerbit surat kabar dikukuhkan sebagai satu-satunya organisasi penerbitan surat kabar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI. Nomor: 47/KEP/MENPEN/1975 tanggal 20 Mei 1975. Eksistensi serikat penerbit surat kabar berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, ialah sebagai wadah yang ikut mengembangkan kehidupan pers yang berjiwakan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan dari segi management berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dalam rangka menciptakan kehidupan pers yang sehat dan merata di seluruh tanah air serta pencerminan jaminan bagi keikutsertaan wartawan serta karyawan pers lainnya dalam pemilikan penerbitan pers.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka serikat penerbit surat kabar juga ikut mengembangkan penerbitan pers nasional dari segi management yang berdasarkan

pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, hal ini sesuai benar dengan jiwa dan semangat pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. Seperti kita maklumi bahwa pasal 8 ayat (1) tersebut berbunyi : Setiap warga negara mempunyai hak untuk bersama dengan orang-orang lain mengusahakan pers dan mengelola badan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakekat demokrasi Pancasila.

2. Asas dan Tujuan Serikat Penerbit Surat Kabar

Serikat penerbit surat kabar berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil makmur secara merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan mewujudkan pers nasional yang sehat, bebas dan bertanggung jawab. Adapun maksud dari asas serikat penerbit surat kabar seperti diuraikan di atas, maka untuk itu serikat penerbit surat kabar bertugas menjaga keharmonisan antara sesama organisasi penerbit pers untuk menghindari dari persaingan yang tidak sehat demi menjaga dan mempertahankan survivalnya, dan di samping itu untuk mewujudkan kesejahteraan anggota-anggotanya yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

3. Upaya-upaya Untuk Mencapai Tujuan Organisasi

Adapun jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari organisasi serikat penerbit surat kabar itu dengan mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan melaksanakan segala usaha guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridnoi Tuhan Yang Maha Esa, serta memajukan, meningkatkan cian menyempurnakan kehidupan pers nasional dan kesejahteraan karyawan pers. Di samping itu untuk mempertinggi mutu kewartawanan dan mutu cetak serta pengembangan periklanan pers, melalui kerja sama dengan organisasi profesi lainnya yang menunjang kehidupan pers nasional dan instansi-instansi pemerintah atau swasta,

yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan serikat penerbit surat kabar.

Memperjuangkan kepentingan para anggota dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan memupuk saling pengertian dan kerja sama yang baik antara sesama anggota, serta mengadakan hubungan dengan organisasi penerbitan pers luar negeri dan badan-badan lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan serikat penerbit surat kabarpers nasional yang telah lama beroperasi di bidang komunikasi massa.

4. Keanggotaan Serikat Penerbit Surat Kabar

Anggota serikat penerbit surat kabar ialah lembaga penerbit pers nasional, dengan klasifikasi sebagai berikut ;

- Anggota biasa, yaitu lembaga penerbit pers nasional yang bersifat umum yang sudah terbit selama satu tahun terus menerus, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku,
- Anggota muda, yaitu lembaga penerbit pers nasional yang bersifat umum belum dapat terbit selama satu tahun terus menerus serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku.
- Anggota luar biasa, yaitu lembaga penerbit non pers yang tidak bersifat umum dan tidak termasuk dalam golongan biasa dan atau golongan muda.

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah diberikan pengertian keanggotaan serikat penerbit surat kabar secara global. Keanggotaan serikat penerbit surat kabar ini terdiri dari anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa. Darfi tiga klasifikasi ini antara anggota biasa, muda dan luar biasa, terdapat perbedaan ya. itu mengenai masa lama tidaknya suatu perusahaan penerbit pers itu berdiri atau beroperasi. Sedangkan persamaan dari ketiga klasifikasi ini adalah mereka sama-sama terdiri dari organisasi profesi yang sama, kecuali anggota luar biasa karena anggota luar biasa ini bisa terdiri dari kalangan penerbit pers itu sendiri atau orang-orang yang bukan dari penerbit pers, tetapi masih ada sangkut pautnya dengan permasalahan penerangan komunikasi massa

pers, seperti Menteri Penerangan atau Departemen Penerangan.

Setelah dua puluh delapan tahun, dihitung sejak kelahiran PWI 9 Pebruari 1946, pertumbuhan dan perkembangan pers nasional cukup membanggakan. Hal ini dimungkinkan oleh situasi dan kondisi nasional yang membaik, serta didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang cetak. Jadi sekurang-kurangnya sejak 20 tahun yang lalu Indonesia telah memasuki teknologi maju dalam kegrafikaan.

Atas dasar sejarah yang melatarbelakangi dan tuntutan zaman yang tengah dihadapi serikat grafika pers lahir di tengah-tengah kehidupan pers nasional pada tanggal 13 April 1974 sebagai organisasi pers di bidang grafika. Yang dimaksud dengan organisasi grafika pers ialah organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menangani produk pers dengan tujuan utama untuk ikut membina pertumbuhan yang sehat, pers yang bertanggung jawab. Oleh karena itu organisasi grafika pers dimasukkan dalam keluarga pers.

Sifat Melawan Hukum Delik Pers dalam KUHP

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana. Sedangkan bagi pandangan formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur Aari perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik. Begitu juga dalam delik pers harus dibuktikan terlebih dahulu tentang unsur tindak pidana, agar sifat melawan hukum menjadi jelas.

Mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum, Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak

perlu dibuktikan.

Konsekwensi dari pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik, maka unsur tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Sama halnya dengan unsur kemampuan bertanggung jawab.

Pembahasan

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966, yaitu tentang Undang-undang Pokok Pers ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang ditarik kedalamnya, antara lain ialah pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan pasal 110 tentang penndaan terhadap suatu agama.

Kasus Penghasutan/Subversi Putusan Nomor 181/1g85/PID/B/PN.Jakarta Keputusan tersebut dalam perkara terdakwa :

N a m a : Hartono Rekso Dharsono
alias Ayah Ton
U m u r : 60 tahun
P e k e r j a a n : (Purnawirawan ABRI)
A l a m a t : Jl. Dr. Setia Budi No. 281
Bandung, Jawa Barat.

Agama : Islam

Posisi kasus Primair :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hartono Rekso Dharsono baik secara sendiri maupun seeara bersama-sama dan bersekutu dengan orang lain, di antaranya dengan Aziz Saleh, All Sadikin, Suyitno Sukirno, Hugeng Imam Santoso, Safrudin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, Slamet Bratanat Anwar Haryono, H,M, Sanusi; yang masing-masing akan diajukan sebagai terdakwa dalam perkara subversi dengan mempergunakan selebaran-selebaran penting peristiwa September 1984. Tersendiri atau terpisah A,M. Fatwa yang telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut pada tanggal 15 September 1934 atau setidaknya dalam tahun 1984 di Jalan Borobudur No, 2 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan serangkaian perbuatan subversi dengan menggunakan

selebaran buletin dengan maksud atau diketahui atau patut diketahui dapat merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah.

Perbuatan-perbuatan mana terdakwa wujudkan dalam bentuk selebaran buletin yang diberikan lembaran putih sebagai sarana untuk melakukan perbuatan subversi antara lain Isinya :

1. Dalam butir ke 4 dari Lembaran Putih peristiwa September 1984 di Tanjung Priok yang berjudul sebab dan akibat terdapat kalimat-kalimat yang sifatnya merongrong kewibawaan pemerintah yang syah dan aparaturnegara antara lain kalimat-kalimat sebagai berikut :

Jika tadi diketengahkan hal-hal yang dianggap sebagai sebab terjadinya musibah 12 September 1964, maka sesungguhnya kesemuanya itu sekeaar penyulut (Tringger) yang meledakkan ketegangan yang lama membara di bawah permukaan stabilitas Hal-hal yang mengganggu fikiran umul dan membentuk suasana resah dalam bidang sosial ekonomi dan politik di kalangan masyarakat sudah pagi-pagi diperingatkan kepada penguasa olehsejumlah pemimpin-pemimpin rakyat ..., dan seterusnya.

2. Kemudian dalam butir ke 5 dari lembaran putih peristiwa September 1984 di Tanjung Priok yang berjudul anjuran terdapat kalimat-kalimat yang sifatnya juga merongrong kewibawaan pemerintah yang syah dan atau aparaturnegara, yaitu antara lain kalimat-kalimat sebagai berikmt : Demi bagi semua fihak, sebaiknya dibentuk komisi yang bebas (independen) untuk mengumpulkan keterangan yang jujur mengenai kejadian September 1984 di Tanjung Priok. Laporan komisi harus diumumkan kepada khal-ayak ramai, supaya kita semua dapat menari k pelajaran dari padanya.

Kedua:

Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas yang telah merongrong kewibawaan pemerintah yang syah dan atau aparaturnegara, maka telah melakukan atau terjadi serangkaian perbuatan-perbuatan dengan maksud atau diketahui atau patut diketahui dapat menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan kekacauan, kegoncangan atau

kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas. Maka dalam dakwaan yang kedua ini terdakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 1 ayat 1 sub c. Pasal 13 Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 21 tahun 1y82 jo W.No. 4 tahun 1961 jo W.No. 11 tahun 1966 pasal 19 ayat k1),

Putusan Hakim :

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan pada waktu persidangan, maka mengenai keterangan terdakwa baik yang disampaikan sewaktu diperiksa oleh majelis hakim, maupun yang disampaikan dalam pembelaan serta dupliknya Di sini majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut dalam dakwaan kedua dipandang sudah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim. Telah melakukan perbuatan subversi dan menggunakan selebaran putih sebagai sarana untuk membantu pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alteratif, maka majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena dakwaan kedua sudah dipandang cukup terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim, maka majelis hakim cukup mempunyai alasan untuk memberikan keringanan pidana daripada pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini :

1. Menyatakan bahwa terdakwa :

N a m a: Hartono Rekso Dharsono alias Ayah Ton

Terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer kesatu dan kedua yakni : pasal 1 ayat 1 sub'b dan sub c jo pasal 13 Undang-undang pemberantasan kegiatan subversi No. 11/PNPS/1963 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No. 11/1966 pasal 19 ayat (1) jo UU no. 4 tahun 1967.

2. Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 tahun dikurangi dengan seluruh masa tahanan sementara yang telah di jalani selama ini.
3. Menetapkan bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang-barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta buku-buku yang diserahkan kepada majelis hakim tentang yayasan lembaga kesadaran berkonstitusi sebagai ad informandum, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini,
5. Menetapkan bahwa terdakwa wajib membayar ongkos perkara Rp 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Analisa

Dengan melihat putusan No. 181/1985/PID/B/PN JKT. atas terdakwa Hartono Rekso Dharsono alias Ayah Ton memang benar melanggar pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 13 Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo W No. 11 tahun 1966 pasal 19 ayat (1) jo UU No. 4 tahun 1967 sehingga terhadap pelaksanaan atas putusan termasuk delik umum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun cukup setimpal dengan apa yang telah diperbuat terdakwa yang cukup banyak membuat masyarakat umum menjadi gelisah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat dapat disimpulkan bahwa apabila kebebasan yang bertanggung jawab sebagai suatu hak asasi menurut konstitusi dalam hukum pers, maka pelaku delik pers dapat dituntut di muka sidang pengadilan.

Saran

Secara formal Undang-undang Pokok Pers Nomor : 21 Tahun 1982 sudah sesuai

dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi secara materiil belum sesuai, sebab masih terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya. Pers harus mampu menumbuhkan aspirasi dan menggugah motivasi masyarakat untuk tampil menggerakkan perjuangan dan kemerdekaan bangsa. Adanya interalasi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat akan membuahkan daya dorong untuk memperlancar laju pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachsan Mustafa, 1987. *Hukum Pers Pancasila*, Alumni, Bandung, 1987.
- Bambang Poernomo, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , *Pertumbuhan Hukum Penyimpanan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Catatan Sekilas Tentang Serikat Grafika Pers, 1985. *Buku Peringatan Hari Pers Nasional I*, Deppen RI.
- Djoko Prakoso, 2001. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- H.G. Rorimpandey, 1987. *Mengenai Serikat Grafika, Pers, Buku Peringatan Hari Pers Nasional III*, Deppen RI.
- I.Taufik, 1997. *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, PT, Triylnco.
- L.M. Gandhi, 2001. *Undang-undang Pokok Pers*, CV Rajawali, Jakarta.
- Oemar Seno Aji, 1990 *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Roesian Saleh, 1983. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PoliTeia, Bogor.
- S. Tasrif, 1991 *Masalah Kebebasan Pers di Indonesia, Suatu Tinjauan dari Segi Jurnalistik Konstitusional Pers Indonesia Berkala untuk Masyarakat Pers*.